

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa

Istilah pemerintah dalam buku Muhadam Labolo¹ menurut Finer mengutip kuper setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok yaitu :

1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasionalisasi oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah,
2. Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung,
3. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Istilah pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan diperintah.

Pemerintah menurut Fahri² pemerintah (*government*) secara etimologi berasal dari kata Yunani *kubernan* atau nahkoda kapal artinya menatap ke

¹Muhadam Labolo. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 14-15

²Marratu Fahri. 2013. *Diktat mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan*. Baturaja : Universitas Baturaja Press
hal 25

depan. Sedangkan memerintah berarti melihat kedepan menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan Negara. Memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Sementara yang dimaksud dengan pemerintahan adalah menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Pemerintah kalau mendapat akhiran “an” yang berarti pemerintah sebagai subjek yang melakukan tugas-tugas atau kegiatan dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.

Menurut Inu Kencana Syafii³ pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1⁴ menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

³Inu Kencana Syafii. 2017. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta hal 8

⁴Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 *op.cit* hal 3

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵. Secara umum pemerintahan desa dapat di definisikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Pemerintah desa mempunyai tugas pokok⁶

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi⁷

1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa,

⁵Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat *Ibid* hal 3s

⁶Inu Kencana Syafii. 2017. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta hal 8

⁷ *Ibid* hal 3s

2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya,
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa,
4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat,
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa,
7. Penyusun, pengajuan rancangan peraturan desa,
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari [perangkat daerah](#) kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan [Kelurahan](#), Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah⁸

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan [kabupaten/kota](#) yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

⁸Muhadam Labolo. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 14-15

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Anwas pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang megalami masalah kemiskinan⁹.

Pemberdayaan adalah upaya men transformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan¹⁰. Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

⁹ Mardikanto T, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfa Beta, hal. 80.

¹⁰ Syaifuddin Yunus, suadi dan Fadli, 2018. *Model Pengembangan Masyarakat terpadu*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. hal. 25-26

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan¹¹. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri¹².

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan adanya pemberdayaan untuk meningkatkan pembangunan lebih baik lagi. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai¹³:

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus dimiliki;
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia masyarakatnya sendiri;
3. Kemampuannya untuk berpemberdayaan dalam kegiatan yang dapat dilakukan;

¹¹ Aprillia Tharesia dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung ; Alfabeta, hal. 93

¹² Mardikanto T, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta, hal. 80.

¹³ Mardikanto T, *Ibid.* hal. 81.

4. Adanya kepercayaan diri, bahwa dia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Tujuan yang ingin dicapai pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang merekalakukan tersebut. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan pemberdayaan tersebut mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan¹⁴

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Sementara tujuan pemberdayaan perempuan menurut Novian adalah :

- 1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Meningkatkan kualitas peranan perempuan sebagai pengambil keputusan

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2016. *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawaliipress, Cet. Ke 2, Hal. 75

dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 3) Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. 4) Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. 5) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak¹⁵.

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi¹⁶

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga¹⁷.

Terdapat empat macam kegiatan yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yaitu¹⁸:

- a. Pemberdayaan dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu

¹⁵ Gagan Ganjar & Mukran Roni, 2015. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Daya Saing Produk Berbahaya Ramah Lingkungan dan UKM*, Jurnal Vol 1 No 2, hal. 33

¹⁶ Edi Suharto, 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Rika Aditma, hal. 63

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2017. *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawaliipress, Cet. Ke 2, Hal. 75

¹⁸ Mardikanto T, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta. hal. 80.

ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

b. Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan/atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Sesuatu yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah

berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

c. Pemberdayaan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Pemberdayaan dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Pemberdayaan dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun, pemberdayaan pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang sering kali menganggap

bahwa dengan selesai pelaksanaan pembangunan itu optimis manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran.

Pemberdayaan adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Pemberdayaan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pembangunan sosial. Bentuk pemberdayaan tersebut bukan sekedar ikut terlibat saja. Masyarakat terlibat aktif dalam: perumusan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta menikmati hasil pembangunan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan juga bukan sekedar alat (*mobilisasi*), tetapi sebagai proses dan tujuan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pekerja sosial dituntut memiliki strategi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Realisasinya pembangunan kesejahteraan sosial perlu dukungan sponsorship (*fundraising*).

Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Pemberdayaan merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Berdasarkan teori tentang pemberdayaan, penulis menggunakan empat macam pemberdayaan yaitu (a) pengambilan keputusan; (b) pelaksanaan kegiatan; (c) pemantauan dan evaluasi pembangunan; dan (d) pemanfaatan hasil pembangunan.

2.3 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan¹⁹.

Berikut ini merupakan program – program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat²⁰:

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk

¹⁹ Mardikanto T, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta, hal. 80.

²⁰ Mardikanto T, *Ibid.* hal. 80.

program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat,

memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan

masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut ini²¹

a) Proses pemberdayaan

Proses pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mampu menjaga lingkungan. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap penyadaran. Tahap ini masyarakat diberikan penyadaran melalui sosialisasi secara lisan dan demplot yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan tokoh-tokoh masyarakat. Kedua, tahap pengkapasitasan. Pada tahap ini masyarakat diberikan kapasitas atau kemampuan dan ketrampilan. Ketiga, tahap pendayaan. Tahap ini memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menerapkan pertanian berkebijutan, masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta kemampuan dan ketrampilan yang telah diberikan. partisipasi masyarakat yang lain juga akan mendukung dan pertanian berkelanjutan.

b) Aktor pemberdayaan

Aktor pemberdayaan dalam hal ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap organisasi, sebab tanpa sumber daya manusia tujuan dan sasaran organisasi tidak akan tercapai

²¹ Mardikanto T, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta, hal. 80.

sesuai yang direncanakan. Aktor pemberdayaan yang berperan dalam pembangunan. Pelaksanaan program yang diberikan kepada pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan biasanya aktor pemberdayaan berasal dari tokoh masyarakat dan pengurus organisasi sebuah desa.

c) Program dan kegiatan pemberdayaan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

d) Dukungan anggaran dan SDM, dan sarana produksi

Produksi Sumber anggaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan pemberdayaan berasal dari APBN, APBD, dan berasal dari sumber daya lainnya.

e) Capaian hasil pemberdayaan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi terbaik dalam pembangunan sosial. Di samping itu kompetensi keempat merupakan kompetensi masyarakat untuk menentukan strategi dalam merealisasikan solusi yang telah ditetapkan. Itu semua akan dapat terwujud apabila proses belajar yang dilakukan efektif. Proses belajar tersebut merupakan suatu keharusan untuk ditempuh, karena sebagai suatu metodologi yang tidak dapat dihindari.

2.4 Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kelembagaan petanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani²². Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender²³.

Dengan demikian, untuk mengetahui gerak pembangunan pertanian perlu perhatian terhadap kelompok tani yang ada di desa. Kelompok tani didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisasikan para petani dalam menjalankan usahataniya.²⁴ Kelompok tani pada hakikatnya adalah untuk menggerakkan sumber daya manusia petani. Pembinaan kelompok tani berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani. Kelompok tani akan membantu

²² Pusat Penyuluhan Pertanian.. Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Jakarta. 2016

²³ Departemen Pertanian. Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro agribisnis (LKM-A): Jakarta. 2015

²⁴ Andi hakim, Nasution. 1Pengantar ke Ilmu-Ilmu Pertanian. Pustaka Litera Antar Nusa. Bogor. 2016 hal. 20

petani yang tergabung dalam keanggotaan untuk memfasilitasi segala kebutuhan mulai dari pembelian sarana produksi sampai penanganan pascapanen dan pemasarannya²⁵.

Kelompok tani juga menjadi titik penting untuk menjalankan dan menterjemahkan konsep hak petani ke dalam kebijakan, strategi, dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh dan pengembangan ke dalam langkah operasional²⁶. Kelompok tani memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai unit belajar, unit kerjasama, dan unit produksi. Apabila ketiga unit tersebut sudah berjalan, maka diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha. Keberhasilan kelompok tani menjalani fungsi – fungsi tersebut tidak lepas dari pengaruh kerja keras anggota dalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama²⁷

Kelompok adalah sebuah unit yang tersusun dari dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama sama demi mencapai tujuan yang ideal. Definisi ini menekankan bahwa kelompok tumbuh karena adanya kesamaan motivasi untuk mencapai maksud tertentu yang menimbulkan kontak-kontak antar mereka sehingga terbentuklah kelompok²⁸. Ciri-ciri suatu kelompok antara lain adalah : (1) adanya interaksi antar anggota yang berlangsung secara berkelanjutan; (2) adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan lainnya (3) adanya

²⁵ Departemen Pertanian. Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro agribisnis (LKM-A): Jakarta. 2015

²⁶ Kementerian, Pertanian. 2010. Petunjuk Teknis Peningkatan (rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A. Kementerian Pertanian. Jakarta. 2019. hal.25

²⁷ Mosher. A.T. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Yasaguna. Jakarta. 2018 hal.76

²⁸ Ibid

kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai; (4) adanya struktur dalam kelompok, para anggota mengetahui adanya hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh di dalam kelompok itu. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki kesamaan dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih luas yang memiliki pengertian sebagai kumpulan petani, peternak dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota²⁹.

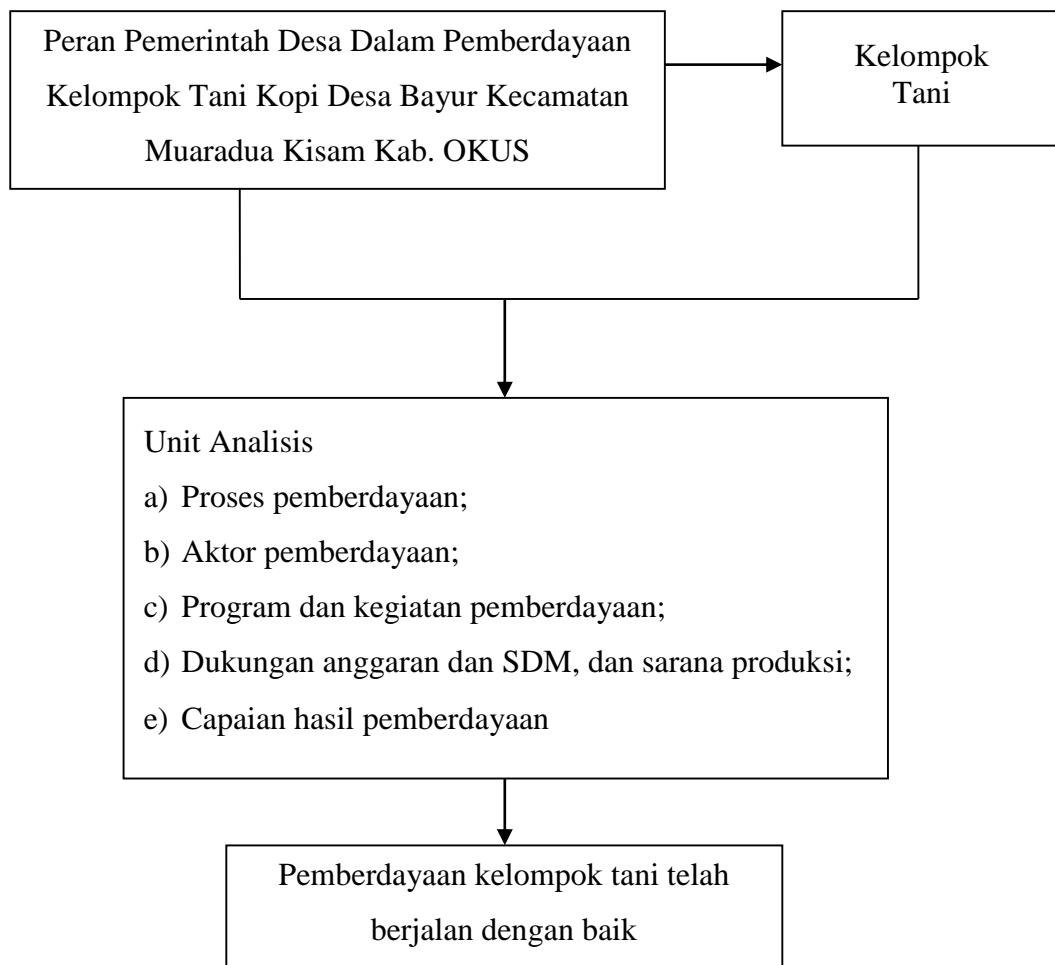
2.5 Kerangka Pikir

Pemberian kewenangan kepada desa merupakan sesuatu hal yang sangat strategis karena pembangunan di desa dilakukan langsung oleh masyarakat secara partisipatif. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, terutama dalam pengembangan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sejatinya kewenangan itu merupakan pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses

²⁹ Departemen Pertanian. Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro agribisnis (LKM-A): Jakarta. 2015

kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering di bicarakan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumber daya manusia.

Berikut digambarkan dalam bagan 2.1



Bagan 2.1 Kerangka Pikir